

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas Elektronik	Kalteng Pos	Borneo News
	Palangka Post	Tabengan



PENYERAHAN: Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin saat penyerahan dana alokasi fiskal kepada Pj Bupati Gumus, Herson B. Aden di Istana Jakarta, Rabu (18/9).

Pj Bupati Gumus Terima Dana Insentif Fiskal Capai Rp6 Miliar

KUALAKURUN - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin menyerahkan dana alokasi fiskal TA 2024 kepada Pj Bupati Gunung Mas (Gumas) Herson B Aden. Kegiatan itu dilaksanakan bertempat di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Pj Bupati Gumus secara langsung menerima dana alokasi insentif fiskal tahun kinerja 2024. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Gumus hampir senilai Rp6 Miliar. Yang dinilai baik dalam mengoptimalkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.

"Kami atas nama Pemkab Gumus berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mendukung dan memberikan

kepercayaan kepada pihak Pemkab, sehingga mendapat dana insentif fiskal kategori daerah berkinerja baik dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ucap Herson B Aden, Kamis (19/9).

Menurut dia, hal ini tentu sudah menjadi motivasi bagi semua dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas untuk lebih optimal dan bekerja keras menghapus kemiskinan ekstrem yang ada di daerah.

"Sejauh ini dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gunung Mas, memiliki sejumlah strategi atau kebijakan yang telah dilakukan dan akan terus dioptimalkan. Lalu pengurangan beban pengeluaran masyarakat,

berupa bantuan iuran JKN, bantuan sosial reguler seperti PKH, BLT," tuturnya.

Selain itu, sambung dia, bantuan asistensi rehabilitasi berkebutuhan khusus dan subsidi energi. Kemudian, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM, infrastruktur skema padat karya tunai, peningkatan SDM dan kapasitas UMKM serta peningkatan pendapatan petani.

"Maka dari itu, upaya kita terus mendorong penurunan jumlah kantong kemiskinan dengan konektivitas antar wilayah, dengan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air minum," pungkasnya dia. (nya/ans)